

1st WEEK**Januari 2020**❖ **MAKRO**

- Badan pembuat kebijakan Federal Reserve menuju tahun 2020 dengan corak baru yang, setidaknya pada permukaannya, tampaknya berkomitmen untuk menjaga suku bunga rendah untuk masa mendatang. Dalam rotasi tahunan anggota pemungutan suara di Komite Pasar Terbuka Federal, Presiden Fed Eric Rosengren dari Boston dan Esther George dari Kansas City menuju ke sela-sela. Mereka adalah dua elang FOMC yang paling terkenal, atau mereka yang menentang langkah bank sentral tahun lalu untuk menurunkan suku bunga. Sebagai gantinya akan ada anggota baru yang diharapkan untuk menerapkan tekanan lebih banyak lagi untuk mempertahankan suku bunga rendah. Presiden Fed Martin Neel Kashkari telah secara terbuka mendesak rekan-rekannya untuk berjanji tidak akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut sampai inflasi cukup tinggi. Presiden regional lain yang akan datang, Robert Kaplan dari Dallas, baru-baru ini mengatakan bahwa ia khawatir tentang pertumbuhan pada kuartal keempat dan berpikir kebijakan berada di tempat yang tepat. Para pemilih baru yang tersisa adalah Loretta Mester dari Cleveland, dianggap sebagai elang yang solid meskipun dia memilih masing-masing dari tiga pemotongan suku bunga pada tahun 2019, dan Patrick Harker dari Philadelphia yang mengadvokasi pada bulan September untuk mempertahankan suku bunga tetap meskipun dia akhirnya memilih untuk September dan Oktober pengurangan seperempat poin.
- Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menaikkan pajak pada orang terkaya di masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan, menurut kepala Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam sebuah posting blog pada hari Selasa, Kristalina Georgieva, direktur pelaksana IMF, mengatakan ketidaksetaraan telah menjadi "salah satu tantangan paling kompleks dan menjengkelkan dalam ekonomi global" selama dekade terakhir. Namun, ia optimis bahwa para pembuat kebijakan memiliki kekuatan untuk memberikan perubahan nyata, meskipun kesulitan politik dalam mengimplementasikan

reformasi. Pertama, Georgieva menyarankan pemerintah perlu memikirkan kembali kebijakan mereka dan mempertimbangkan perpajakan progresif. "Perpajakan progresif adalah komponen kunci dari kebijakan fiskal yang efektif," katanya. "Di bagian atas distribusi pendapatan, penelitian kami menunjukkan bahwa tarif pajak marjinal dapat dinaikkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi." IMF telah lama menganjurkan kebijakan pajak progresif, menamakannya salah satu dari tiga metode utama untuk mengatasi ketidaksetaraan pada tahun 2017. Cara lain pembuat kebijakan dapat mengatasi ketidaksetaraan adalah melalui "penganggaran gender," kata Georgieva. Penganggaran gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan berfokus pada bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan dibelanjakan, menurut UE. Ini dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat atau daerah dan dapat mencakup langkah-langkah seperti merestrukturisasi anggaran dan kebijakan atau meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses anggaran.

- Ulasan:

Dengan tahun baru yang sedang berjalan, keseimbangan komite diharapkan untuk mengikuti filosofi yang diungkapkan Ketua Jerome Powell pada bulan Desember ketika ia mengatakan The Fed perlu melihat inflasi "yang persisten dan signifikan" sebelum bergerak pada tingkat suku bunga.

❖ **MIKRO**

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 2019 sebesar 2,72%. Angka ini bahkan lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan angka 2,72% merupakan yang terendah sejak 20 tahun terakhir. Dia mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan inflasi rendah. "Pertama itu bahwa kapasitas produksi atau pasokan jauh lebih memadai daripada permintaan," kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Perry mengungkapkan, pasokan masih tetap memadai meskipun adanya kenaikan permintaan konsumen. Kemudian koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dan keterjangkauan harga. Hal ini menunjukkan rendahnya inflasi volatile food.

"Komoditas barang penyumbang inflasi seperti bawang merah, cabai memang naik sedikit tapi tidak besar," jelas dia.

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membersihkan pasar modal dari transaksi tidak sehat atau yang biasa disebut transaksi goreng saham. "Kepercayaan yang begitu besar dari berbagai pihak harus kita jaga karena dalam kesempatan ini saya berpesan dan mendukung agar otoritas bursa, OJK, BEI segera membersihkan bursa dari praktik-praktik jual beli saham yang tidak benar. Jangan kalah dengan yang jahat-jahat. Hati-hati, harus bersih, berintegritas, berani," ujar Jokowi di gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/1/2020). Meski tak secara eksplisit menyinggung perusahaan pelat merah apa saja yang tersangkut kasus goreng saham ini, namun Jokowi menyebut dirinya tau praktik kerap terjadi di pasar modal RI setelah mendapat informasi terkait adanya manipulator yang menggoreng harga saham sehingga harga tak sesuai dengan kondisi riil. "Ya saya berbicara pasti karena saya mendengar informasi. Dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Ketua OJK, Dirut BEI. Kami memiliki semangat yang sama untuk bangun kepercayaan dan trust bagi BEI," katanya.

Ulasan:

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang stabil turut mendorong terjaganya inflasi. Sehingga tekanan harga dari eksternal dan global rendah sehingga tak ada kenaikan yang signifikan.

❖ **PERBANKAN**

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah mendorong 290.230 pelaku UMKM KUR BRI naik kelas di sepanjang tahun 2019. Pelaku UMKM penerima KUR BRI ini disebut naik kelas dengan dua indikator, yakni meningkatnya jumlah pinjaman yang diterima serta berhasil beralih dari KUR ke pinjaman komersial. Selama periode Januari hingga Desember 2019 BRI telah berhasil menyalurkan KUR senilai Rp 87,9 triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM, di mana lebih dari 50% di antaranya disalurkan

ke sektor produksi. Corporate Secretary BRI Hari Purnomo menyebutkan, keberhasilan Bank BRI mendorong lebih dari 290 ribu penerima KUR naik kelas tersebut tak lepas dari komitmen perseroan dalam pemberdayaan UMKM. "Tak hanya memberikan fasilitas pinjaman berupa KUR, Bank BRI juga menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan UMKM seperti BRIncubator, Rumah Kreatif BUMN (RKB) serta clustering UMKM," ujar Hari dalam keterangannya, Senin (13/1/2020).

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melunasi fasilitas kredit yang diberikan pada September 2018. Dengan pelunasan tersebut, maka rekening Jiwasraya telah ditutup. "Pada bulan September 2018 Perseroan memberikan fasilitas kredit kepada Jiwasraya untuk keperluan operasional perusahaan. Fasilitas kredit secara perlahan diselesaikan dari hasil penjualan jaminan berupa obligasi. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas kredit atas nama Jiwasraya sudah dilunasi dan rekening telah ditutup," kata Sekretaris Perusahaan BNI Meiliana mengutip keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (3/1/2020). Dalam keterbukaan itu disebutkan, BNI memberikan fasilitas kredit pada Jiwasraya untuk keperluan operasional perusahaan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 46 tanggal 13 September 2018 dengan maksimum kredit Rp 218 miliar. Jangka waktu kredit sejak penandatanganan perjanjian kredit yakni 13 September 2018 sampai 12 September 2023.

Ulasan:

Di tahun 2020 BRI optimistis mampu menyalurkan KUR senilai Rp 120,2 triliun sesuai breakdown dari Pemerintah, 60% di antaranya disalurkan ke sektor produksi. Strateginya yakni dengan memperluas jaringan pemasaran melalui 45 agen BRILink hingga melakukan sinergi dengan berbagai program kementerian dan lembaga

Disclaimer: Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.